

# IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SD AL-ISLAH SURABAYA

Mohammad Royan Tabrani

S1 Ilmu Administrasi Publik, FIS, UNESA ([nnsw.spd@gmail.com](mailto:nnsw.spd@gmail.com))

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

## ABSTRAK

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya untuk merespon berbagai tantangan tantangan internal dan eksternal. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang pelaksanaannya melalui penyederhanaan, tematik-integratif, memberikan tambahan jam pelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) dari apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui. Setelah menerima materi pembelajaran siswa diharapkan memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Masalah implementasi yang terjadi di SD Al-Islah Surabaya dalam melaksanakan Kurikulum 2013 ada dua dari aspek penilaiannya dan penerimaan buku yang terlambat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya menggunakan teori dari George Edward III dengan empat variabel yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan disposisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya sudah berjalan tetapi masih ada beberapa kendala. Hal tersebut dapat diketahui dari empat variabel yaitu pertama komunikasi dimana dalam penerapan Kurikulum 2013 komunikasi yang sudah dilakukan tetapi masih ada informasi yang tidak tersampaikan, oleh karena itu perlu adanya peningkatan dalam komunikasi. Kedua, sumber daya implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya masih kurang karena jumlah guru dan siswa tidak sepadan. Hal ini mengakibatkan proses penilaian siswa menjadi lama, ada juga kendala dalam pengiriman buku materi belajar Kurikulum 2013 yang terlambat datang, sedangkan dari segi fasilitas yang ada sudah menunjang. Ketiga, disposisi staf guru sudah melaksanakan Kurikulum 2013 sudah baik dan mempunyai komitmen dan yang keempat struktur birokrasi para pelaksana sudah melakukan sesuai dengan buku pedoman atau SOP dari Kurikulum 2013. Pelaksana Kurikulum 2013 juga sudah memberikan tanggung jawabnya berupa penilaian. Empat variabel ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya sudah berjalan namun masih perlu adanya perbaikan seperti diadakannya pertemuan rutin dan penambahan jumlah guru agar pelaksanaan Kurikulum 2013 menjadi lebih baik lagi.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya

## ABSTRACT

*Curriculum 2013 is a development of the previous curriculum to respond to the challenges of internal and external challenges. Curriculum 2013 is curriculum implementation through simplification, thematic-integrative, provide additional hours of lessons and aims to encourage students to be better at making observations, asking, reason, and communicate the (present) of what they earn or they know. After receiving the learning material students are expected to have competence attitudes, skills, and knowledge that much better. Implementation problems that occurred in the Al-Islah SD Surabaya in implementing Curriculum 2013 there are two aspects of the assessment and acceptance of overdue books. The main objective of this study was to describe the implementation of the curriculum in 2013 in Al-Islah SD Surabaya.*

*This research is a descriptive qualitative approach. This study focuses on the implementation of Curriculum 2013 in SD Al-Islah Surabaya using the theory of George Edward III by four variables: communication, bureaucratic structures, resources and disposition.*

*The results showed that the implementation of Curriculum 2013 in SD Al-Islah Surabaya is already running but there are still some obstacles. It can be known from four variables: the first communication in the implementation of Curriculum 2013 in which communication has been done but there is still no information conveyed, hence the need for improvement in communication. Second, the resources in the implementation of Curriculum 2013 SD Al-Islah Surabaya still less because the number of teachers and students are not worth it. This resulted into a long process of student assessment, there are also constraints in the delivery of books and learning materials were late coming Curriculum 2013, while in terms of existing facilities already support. Third, the disposition of the staff teachers are implementing Curriculum 2013 has been good and has the commitment and the fourth structure of the executive bureaucracy has done in accordance with the manual or SOP of 2013. Implementing Curriculum Curriculum 2013 also has given his responsibility in the form of assessment. Four variables concluded that the implementation of Curriculum 2013 in SD Al-Islah Surabaya already running but is still need for improvement such as the holding of regular meetings and increase the number of teachers for the implementation of Curriculum 2013 to better again.*

**Keywords:** Implementation, Curriculum 2013 in SD Al-Islah Surabaya

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sudah mengalami pengembangan kurikulum mulai dari kurikulum 1947 “Rencana Pelajaran” hingga yang paling terbaru yaitu kurikulum 2013 atau yang biasa dikenal dengan “K-13”. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perubahan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing dimasa depan. Alasan lain dilakukannya perubahan kurikulum adalah kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik, terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga membuatnya terbebani.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum pelaksanaannya melalui penyederhanaan, tematik-integratif, memberikan tambahan jam pelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran dan diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, untuk memasuki masa depan yang lebih baik.

Program Kurikulum 2013 ini merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. (Sumber: <http://en.hukumonline.com>, 2014)

Di Surabaya, Kurikulum 2013 sudah diterapkan sejak bulan Juli 2013 tepatnya saat tahun ajaran baru tahun 2013-2014. Ada 13 sekolah yang menjadi sekolah sasaran penerapan Kurikulum 2013. Dari 13 sekolah yang menjadi sasaran penerapan Kurikulum 2013, 11 diantaranya adalah SD Negeri dan 2 SD Swasta. SD Al-Islah adalah salah satu SD Swasta yang ditunjuk oleh pusat sebagai sekolah sasaran Penerapan Kurikulum 2013. Ada 13 sekolah di Surabaya yang pertama kali menerapkan Kurikulum 2013, dan SD Al-Islah menjadi sekolah yang sangat banyak jumlah siswanya dibandingkan dengan sekolah SD lainnya, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Sekolah SD di Surabaya yang menerapkan Program Kurikulum 2013

No	NPS N	Sekolah	Jumlah Paket Buku					
			G u r u K e l a s I	G u r u K e l a s I V	S i s w a K e l a s I	S i s w a K e l a s I V	A g a m a K e l a s I	A g a m a K e l a s I V
370	2053 2907	SD NEGERI DR. SUTOMO III/325	1	1	4	4	4	4
371	2053 2906	SD NEGERI DR. SUTOMO II/324	1	1	3	3	3	3
372	2053 3434	SD NEGERI KAPASAN IX/151	1	1	2	2	2	2
373	2053 3435	SD NEGERI KAPASAN IV/146	1	1	3	3	3	3
374	2053 3189	SD NEGERI PAKIS IX/376	1	1	3	4	3	4
375	2053 2894	SD N DUKUH KUPANG II	1	2	4	6	4	6
376	2053 3443	SD NEGERI KAPASAN III/145	1	1	4	4	4	4
377	2053 2969	SD NEGERI BANYU URIP VIII/522	2	2	1	1	1	1
378	2053 3257	SD NEGERI SAWAHAN II/341	1	1	0	0	0	0
379	2053 3173	SD NEGERI PANJANGJ IWO II-266	1	1	4	4	4	4
380	2054 1290	SD NEGERI SUMUR WELUT I 438	1	1	2	2	2	2
381	2053 3126	SD KHADIJAH	2	2	6	6	6	6
382	2053 1849	SD AL ISLAH	4	4	1	1	1	1

(Sumber: [kurikulum.kemendikbud.go.id](http://kurikulum.kemendikbud.go.id), 2014)

SD Al-Islah merupakan salah satu sekolah yang memiliki jumlah siswa cukup banyak yakni sejumlah 825 siswa, yang terbagi menjadi 21 kelas yang masing-masing kelas memiliki jumlah siswa kurang lebih 39 siswa. Diantara 21 kelas, 14 kelas menerapkan kurikulum 2013 yang terdiri dari 4 jenjang yaitu kelas 1 dan 2 serta kelas 4 dan 5. (Sumber: Database Jumlah Siswa di SD Al-Islah, tahun 2014). Dari jumlah siswa yang ada, proses penilaian dan proses pengiriman buku dari pusat yang lama. Kedua masalah tersebut merupakan kendala dalam penerapan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah.

Melihat dari kendala yang ada di SD Al-Islah Surabaya peneliti melihat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faria Ruhana dan Yesi Yuliana adalah Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Isi dari penelitian tersebut implementasi kebijakan penelitian kurikulum tingkat satuan pendidikan di Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisis penerapan teori Edward III dan analisis temuan fakta dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di Lubuklinggau, untuk pengembangan teori. Hasil menunjukkan bahwa di antara empat faktor yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, didalam pelaksanaan kebijakan bahwa faktor komunikasi dan sumber daya masih perlu perbaikan secara konsisten dalam rangka program kurikulum tingkat satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Temuan penting dari penelitian ini bahwa budaya sangat berperan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan menerapkan kebijakan. ([ejurnal.unri.ac.id](http://ejurnal.unri.ac.id), 2014).

Perbedaan dari penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti tentang Implementasi KTSP sedangkan penelitian ini meneliti tentang Implementasi Kurikulum 2013, tetapi ada kesamaan dalam pemakaian teori yaitu teori Edward III.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, kajian tentang implementasi ini menjadi sangat perlu mengingat program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk meninjau proses Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya, peneliti menggunakan teori dari George Edward III dalam Subarsono (2005:90), ada empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari ke empat variabel ini terdapat indikator yakni dari segi komunikasi ada tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi,

indikator dari sumber daya ada dua yaitu fasilitas dan staf, indikator disposisi ada dua yaitu pengangkatan birokrat dan insentif, dan indikator struktur birokrasi ada dua yaitu SOP dan fragmentasi, dari ke empat variabel dan terdiri dari beberapa indikator ini maka akan dapat mengetahui pelaksanaan atau penerapan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya.

Dengan teori yang dinyatakan oleh Edward tentang penilaian implementasi kebijakan maka akan memberi suatu deskripsi Implementasi Kurikulum 2013 dengan jelas baik faktor pendukung maupun penghambatnya. Dengan demikian penelitian ini mengambil fokus tentang “**Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, baik teoritis maupun praktis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan akan mempunyai implikasi teoritis bagi ilmu administrasi negara khususnya studi tentang implementasi kebijakan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Intansi Penelitian**

##### **1) SD Al-Islah**

Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan bahan evaluasi dalam kajian penerapan tentang Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya.

##### **2) Dinas Pendidikan Surabaya**

Sebagai bahan masukan dan evaluasi tentang Implementasi Kurikulum 2013 agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan

#### **b. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima guna mengembangkan berbagai kajian teori yang berkaitan dengan penelitian dan menganalisis berbagai masalah yang ditemui.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Publik

#### 1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik didefinisikan oleh Edward dan Sharkansky dalam Ismaily, (2002:19) “*What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs.*” yang dapat diartikan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Thomas R. Dye dalam Widodo, (2009:12) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah”. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi demi teratasinya suatu persoalan publik.

Fredrich yang dikutip oleh Wahab, (2008:3) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

“suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang telah ditentukan selalu mempunyai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Untuk menentukan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak maka kebijakan harus diimplementasikan. Implementasi merupakan tindakan nyata untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Jika kebijakan publik hanya berhenti sampai pada tahap formulasi maka akan menjadi sia-sia karena tidak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sehingga tidak memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

#### 2. Unsur-Unsur Implementasi

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana
- b. Adanya program yang dilaksanakan serta

c. *Target group* atau kelompok sasaran.

#### 3. Tipologi Kebijakan Publik

Para ilmuwan Politik dan ilmuwan Administrasi Publik telah mengembangkan sejumlah bentuk (tipologi) umum untuk mengelompokkan kebijakan-kebijakan publik. Pengembangan bentuk pemahaman bentuk kebijakan publik sangat diperlukan karena akan membantu kita dalam mengetahui beberapa perbedaan antara kebijakan (*policies*) dan penggeneralisasian kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan dapat dikelompokkan berdasarkan dampak sosial dan hubungannya dengan pembentukan kebijakan (Agustino, 2008:91-93) yaitu:

- a. Kebijakan *distributive* adalah kebijakan dalam mengalokasikan pelayanan atau manfaat terhadap segmen tertentu dari masyarakat-individu, kelompok, perusahaan dan masyarakat. Kebijakan distributif biasanya melibatkan penggunaan dana publik untuk membantu kelompok, masyarakat atau perusahaan tertentu.
- b. Kebijakan *redistributive* merupakan usaha hati-hati yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan, pendapatan, pemilihan atau hak-hak diantara kelompok-kelompok penduduk, misalnya dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Kebijakan ini biasanya terkait dengan kelompok profesi tertentu.
- c. Kebijakan *regulatory* adalah kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang. Kebijakan ini pada dasarnya bersifat mengurangi kebebasan untuk melakukan sesuatu atau memberlakukan larangan terhadap perilaku individu atau kelompok.

Kebijakan *self-regulatory* adalah kebijakan yang membatasi atau mengawasi terhadap suatu kelompok yang dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada kelompok tersebut untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka melindungi atau mempromosikan kepentingan dari anggota kelompoknya.

#### 4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Winarno,2002:29)

Meski demikian, harus diakui bahwa studi tentang implementasi kebijakn kurang mendapat perhatian dikalangan ilmuwan politik maupun policy maker (Winarno,2002:104), sebenarnya hal ini bukan berarti bahwa studi tentang implementasi kebijakan tidak terlalu penting melainkan karena rumitnya kompleksitas interelasi yang terdapat didalamnya. Tentang hal ini dinyatakan :

“Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa proses implementasi diabaikan oleh para pembuat kebijakan dan Analisis analisi kebijakan, dan juga tidak berarti bahwa hambatan-hambatan tersebut tidak dapat diatasi. Beberapa ilmuwan politik maupun pembuat kebijakan telah mulai mengembangkan studi implementasi kebijakan. Salah satu faktor yang menjadi pendorong adalah akibat dari hasil-hasil yang mengecewakan dari program-program sosial yang bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang membantu pemahan proses implementasi kebijakan (Winarno, 2002:105).

Kamus Webster merumuskan implementasikan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implikasi dari pandangan ini maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, dan dekrit presiden) (Wahab:2008).

Jones dalam (Tangkisilan2003) menganalisis masalah pelaksanaan kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus-menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilaksanakan.

Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan, adalah :

1. Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program

kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.

2. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah dan lain-lain.

Setidaknya ada dua hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi : pertama secara praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program sehingga dapat dideteksi apakah program telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negatif yang ditimbulkan. Kedua, memberikan alternative model pelaksanaan program yang lebih efektif.

Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2002:102) Berdasarkan pandangan yang diutarakan diatas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negative maupun yang positif.

## 5. Model-Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu (Tachjan, 2006:36-37). Model yang dikemukakan oleh para ahli untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan publik dengan melihat beberapa kriteria yang dianggap berpengaruh dalam suksesnya implementasi kebijakan publik. Kriteria tersebut mendeskripsikan suatu keadaan dari obyek yang kita teliti dengan lebih sederhana. Implementasi kebijakan dijelaskan satu persatu sesuai dengan kriteria yang dianggap berpengaruh dalam implementasi. Kriteria satu dengan kriteria yang lain dalam suatu model kebijakan publik pasti memiliki kaitan sehingga pada akhirnya dapat dideskripsikan secara komprehensif dengan mengambil kesimpulan dari penjelasan berbagai kriteria tersebut. Kriteria yang disorot dalam menjelaskan implementasi kebijakan publik berbeda-beda.

George Edward III dalam Subarsono (2005:90) mengusulkan 4 (empat) variable yang

sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, Ke empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat, ke-empat faktor tersebut yaitu;

- 1) Komunikasi, komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan perlu adanya ketepatan dan ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaian informasi.
- 2) Sumber-sumber (Resources) , sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia, yang meliputi sumber-sumber adalah :Staf, yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, fasilitas, bisa berupa dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
- 3) Disposisi, berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Sering sekali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung sampai sejauh mana wewenang yang dimilikinya.
- 4) Struktur Birokrasi, suatu kebijakan sering kali melibatkan lembaga-lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga- lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Empat kriteria yang dianggap berpengaruh dalam implementasi kebijakan menurut George Edward III. Penggunaan model ini dirasa cocok oleh peneliti untuk lebih memudahkan dalam mendeskripsikan kebijakan publik yang dipilih.

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami

oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Ada 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya :

- 1) Transmisi  
Penyaluran komunikasi atau informasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
  - 2) Kejelasan  
Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) harus jelas dan tidak ambigu.
  - 3) Konsistensi  
Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk di terapkan dan di jalankan.
- b. Indikator Sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yang meliputi

- 1) Staf / pegawai  
Ini merupakan sumber daya utama dalam keberhasilan implementasi.
  - 2) Fasilitas  
Sumber daya berikutnya adalah fasilitas. Keberadaan fasilitas sebagai faktor penunjang implementasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi.
- c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program

kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

#### d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada suatu kebijakan maka hal ini akan menyebagikan sumberdaya-sumberdaya yang tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan baik. Dua indikator yang dapat mendongkrak kinerja suatu birokrasi kearah yang lebih baik.

- 1) Melakukan *Standart Operating Prosedur* (SOP)
- 2) Fragmentasi.

Menurut George Edward III *Standart Operating Prosedur* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja biasanya digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum dalam organisasi public dan swasta. SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan aturan.

Fragmentasi merupakan struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi yang seringkali terjadi destralisasi kekuasaan guna mencapai tujuan kebijakan, oleh karena itu penyebaran wewenang atau tanggung jawab dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan diperlukan koordinasi yang baik antara para birokrat atau para pelaksana kebijakan.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif. Analisanya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung Nazir dalam buku Soedjatmoko (1983:105). Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu metode deskriptif sering disebut metode analisa. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-

kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong 2006:4) mendefinisikan;

“metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam (Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa;

“penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan secara terperinci dan mengevaluasi tentang implementasi kurikulum 2013. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka peneliti akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara.

#### B. Lokasi Penelitian

Berkenaan dengan lokasi penelitian ini dilakukan di SD Al-Islah Gununganyar Tengah 22-24 Surabaya. SD Al-Islah adalah salah satu SD Swasta yang menjadi sasaran di Surabaya untuk menerapkan kurikulum 2013. SD Al-Islah memiliki murid yang sangat banyak dan dalam tahap-tahap awal untuk mengimplementasikan kebijakan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya yang masih terdapat problem atau kendala, hal ini perlu diadakan sebuah kajian yang mendalam tentang Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah.

#### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya. Untuk mengetahui implementasi program tersebut maka fokus dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumberdaya, disposisi, dan yang terakhir adalah komunikasi.

1. Dari faktor struktur birokrasi yang akan dikaji adalah:
  - a. *Standart operational procedure* (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan.
  - b. *Fragmentasi*

2. Dari faktor sumberdaya yang akan dikaji adalah:
  - a. Staff yang menjalankan kebijakan
  - b. Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan juga pelaksana kebijakan.
  - c. Kewenangan dari para pelaksana kebijakan
  - d. Fasilitas yang ada mendukung keberlangsungan pelaksanaan kebijakan.
3. Faktor disposisi yang akan dikaji adalah:
  - a. Sikap dari para pelaksana kebijakan
  - b. Insentif
4. Dari faktor komunikasi yang akan dikaji adalah:
  - a. Penyaluran komunikasi dalam pelaksanaan kurikulum 2013
  - b. Kejelasan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan
  - c. Konsistensi perintah dalam pelaksanaan kebijakan.

#### D. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di daerah penelitian. Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh informan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Data primer merupakan narasumber utama. Narasumber adalah orang-orang yang benar-benar tahu dan terlibat dengan program yang sedang dijalankan. Pemilihan informan atau narasumber sebagai sumber data atau informan dalam penelitian ini, berdasarkan asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Pemilihan informan ditentukan oleh peneliti dengan disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Hal tersebut didukung dengan penjelasan Usman dan Purnomo (2009:82) "... pengertian sampling ialah pilihan peneliti sendiri secara purposif yang disesuaikan dengan tujuan penelitiannya". Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Bapak H. Abdul Barry, S.Pd selaku kepala sekolah, Ibu Tutik selaku guru kelas I, Ibu Mauidhotin selaku guru kelas II dan Ibu Novita Nurma selaku guru kelas IV, sedangkan dari pihak staff yang menjadi informan adalah Ibu Nurul Faridah, salah satu murid kelas IV yang juga menjadi informan adalah Nawwal Fauziah di SD Al-Islah Surabaya.

Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan variasi informasi (mencapai titik jenuh), maka peneliti tidak mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap

selesai (telah cukup). Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi juga bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain: catatan, buku, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2010:156) terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui wawancara, angket dan observasi.

##### 1. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam (*indepth interview*) akan dilakukan kepada sejumlah informan. Wawancara mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan dengan informan. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang subjek penelitian serta pendirian-pendirian mereka yang merupakan pembantu utama metode observasi.

Wawancara akan sangat membantu dalam mengumpulkan data karena instrumen atau alat penelitian dalam metode kualitatif yang merupakan peneliti itu sendiri. Penggunaan model wawancara tentu saja disesuaikan dengan keberadaan data lapangan yang dicari dan diperlukan oleh peneliti. Dengan metode wawancara dapat diperoleh data secara akurat karena data didapatkan dari tangan pertama (*primer*). "Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon" (Sugiyono, 2010:157).

Wawancara tak terstruktur atau terbuka identik dengan wawancara bebas, sifatnya hanya membimbing dan membantu dalam proses wawancara. Peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengandung jawaban atau komentar subjek atau informan secara bebas. Pandangan, pendapat, sikap dan keyakinan informan yang diwawancarai tidak banyak dipengaruhi pewawancara dan biasanya berlangsung secara informal. Penelitian dengan wawancara tak terstruktur akan lebih mudah mendapat data secara

mendalam dari responden. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian awal atau penelitian yang lebih mendalam terhadap responden (Sugiyono, 2010:160).

Dipilihnya metode wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk:

- a. Memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya tentang bagaimana Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al Islah Surabaya.
- b. Memperoleh informasi dengan cepat dan langsung dari informan.
- c. Memperoleh jawaban yang valid berdasarkan mimik, emosi informan saat memberikan informasi atau pendapat.
- d. Memperoleh jawaban yang akurat karena apabila ada salah penafsiran dari informan, peneliti bisa langsung memperbaiki atau meluruskan yang dimaksud oleh peneliti.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara tidak terstruktur. Dimana peneliti hanya memasukkan inti dari apa yang akan diwawancarakan sebagai pedoman wawancara.

## 2. Observasi

Guna mempermudah pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Observasi biasanya dapat digunakan untuk mengamati tingkah laku yang aktual. Dalam penelitian ini tipe observasi yang dipergunakan adalah tipe *participant as observer* yaitu memberitahukan maksud peneliti kepada kelompok yang diteliti. Sebagai mana yang dinyatakan Sugiyono (2011:228) observasi terstruktur merupakan teknik pengumpulan data dengan menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi narasumber akan tahu bahwa aktivitas-aktivitas peneliti mulai awal sampai akhir penelitian.

Dipilihnya teknik observasi sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data dikarenakan:

- a. Dengan observasi di lapangan akan dapat diperoleh gambaran atau informasi yang holistik mengenai Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya. Melalui observasi akan didapat data yang kurang atau tidak akan terungkap dalam wawancara.
- b. Observasi akan memberikan temuan data tentang hal-hal yang tidak terungkap oleh informan dalam wawancara karena bersifat sensitif.

Dengan demikian dalam penelitian ini, selain menggunakan wawancara tidak terstruktur, peneliti juga menggunakan teknik pengambilan data dengan observasi terstruktur. Dimana peneliti melaksanakan observasi secara terstruktur dalam berbagai aktivitas Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai pelengkap yaitu teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Sebagaimana yang kemukakan oleh Sugiyono (2011:240) hasil penelitian observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa lalu. Dokumentasi merupakan bukti autentik yang akan memberikan kekuatan nyata dan empiris tentang data yang diperoleh.

“Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang” (Sugiyono, 2011:240). Data yang didapat dari dokumentasi bagaimana Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya. Ini merupakan data sekunder yang sangat membantu dalam melengkapi data primer yang dihasilkan dari wawancara.

Berdasarkan penjelasan teknik pengumpulan data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian mengenai Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, observasi terstruktur dan dokumentasi.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong 2006:4) mendefinisikan;

“metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam (Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa;

“penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menganalisis data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman (2007:16).

Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Tahap reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan

2. Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis

3. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. HASIL PENELITIAN

###### 1. Deskripsi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari Kurikulum sebelumnya untuk merespon berbagai tantangan-tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan Kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama. *Pertama*, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. *Kedua*, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. *Ketiga*, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. *Keempat*, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. *Kelima*, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. *Keenam*, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Prinsip-prinsip ini diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. (Sumber: Buku

Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2014)

Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya bisa dilihat dari tipologi kebijakan publik, kebijakan dapat dikelompokkan berdasarkan dampak sosial dan hubungannya dengan pembentukan kebijakan, ada empat kebijakan yang pertama kebijakan *distributive*, yang kedua kebijakan *redistributive*, yang ketiga kebijakan *regulatory*, dan yang keempat adalah kebijakan *self-regulatory*. Implementasi kurikulum 2013 dilihat dari tipologi kebijakan publik menggunakan kebijakan *regulatory*.

Kurikulum 2013 ini merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan penyempurnaan dari perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penjelasan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia hasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014, menyebutkan bahwa salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumberdaya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah. Dengan demikian pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Standar Nasional Pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian, yang bersama-sama membangun kurikulum pendidikan penting dan mendesak untuk disempurnakan. Selain itu, ide prinsip dan norma yang terkait dengan kurikulum dirasakan penting untuk dikembangkan secara komprehensif dan diatur secara utuh pada satu bagian tersendiri. (Sumber: <http://en.hukumonline.com>, 2014)

Sekolah sasaran dari Kurikulum 2013 adalah sekolah yang sudah mencontohkan sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan sekolah yang terakreditasi A, seperti yang disampaikan oleh M. Nuh (Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu), sekolah yang menjadi sasaran implementasi Kurikulum 2013 berbasis provinsi dan diprioritaskan pada sekolah yang sudah siap. Ia mencontohkan sekolah RSBI (Rintisan

Sekolah Bertaraf Internasional) dan sekolah yang terakreditasi A. "Sehingga pada 15 Juli Kurikulum 2013 bisa dilaksanakan." ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 2014).

Jumlah sekolah sasaran yang melaksanakan Kurikulum 2013 yang ada di Surabaya seperti pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah Sekolah Dasar yang melaksanakan Kurikulum 2013 ada tigabelas sekolah dasar yang ada di Surabaya yang dijadikan pemerintah sebagai sekolah sasaran. Sebelas diantaranya adalah SD Negeri dan dua SD Swasta.

#### a. Profil SD Al-Islah Surabaya

SD Al-Islah Surabaya beralamat di Jl. Gununganyar Tengah 22-24 Surabaya kelurahan Gununganyar kecamatan Gununganyar kota Surabaya. SD Al-Islah Surabaya secara geografis mempunyai luas tanah sebesar 2500 m<sup>2</sup> dan luas keseluruhan 4300 m<sup>2</sup>. SD Al-Islah Surabaya berdiri pada tahun 17 September 1932 dan dioperasikan 1 April 1954. Nama Yayasan dari SD Al-Islah adalah YPI Al-Islah dan status bangunannya adalah milik Yayasan.

#### b. Visi dan Misi SD Al-Islah Surabaya

##### 1) Visi

Visi SD Al-Islah Surabaya adalah "BERKARAKTER DAN BERPRESTASI DALAM BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK"

##### 2) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang harus dijalankan antara lain:

- a) Menyelenggarakan pendidikan guna mengembangkan multi kecerdasan peserta didik yang meliputi kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, social, estetika, dan kinetika.
- b) Mengembangkan karakter dasar diantaranya religius, santun, jujur, sportif, mandiri, kasih sayang, demokratis, kebhinekaan, kompetitif, dan bertanggung jawab.
- c) Cerdas dalam menghadapi tantangan global.

#### c. Tujuan

Tujuan pendidikan SD Al-Islah Surabaya dirumuskan mengacu pada Visi dan Misi yang dikembangkan sebagai berikut:

- 1) Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama sehingga terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjadikan sekolah sebagai pusat layanan pendidikan bermutu berdasarkan Standar Pendidikan Nasional.

#### d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat diperlukan oleh setiap organisasi dalam menjalankan aktivitas kerjanya. Adanya struktur organisasi membuat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab

masing-masing bagian akan semakin tertata karena struktur organisasi merupakan pola tetap hubungan antara fungsi, bagian, dan posisi setiap orang di dalam organisasi tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi tumpah tindih (*overlapping*) dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kekacauan dalam menjalankan tugas masing-masing. Pembagian tugas dalam organisasi haruslah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi.

Adanya struktur organisasi yang baik akan dapat dicapai suatu koordinasi dan hubungan kerja yang baik pula, sehingga lebih memudahkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai posisi dalam suatu organisasi yang nantinya juga akan memudahkan jalannya organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

#### e. Tupoksi Yayasan

- 1) Dewan Musytasyar
- 2) Ketua Umum
- 3) Ketua Satu dan Dua
- 4) Sekretaris
- 5) Bendahara
- 6) SEksi-Seksi
- 7) Seksi Pendidikan

#### f. Tupoksi Lembaga

- 1) Kepala Sekolah
- 2) Wakil Kepala Satu (Bidang Kurikulum dan Kesiswaan)
- 3) Wakil (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)
- 4) Tata Usaha Sekolah
- 5) Wali Kelas
- 6) Guru
- 7) Karyawan

#### g. Implementasi Kurikulum 2013 SD Al-Islah Surabaya

Sejak bulan Juni 2013 pemerintah telah meresmikan Kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum yang sebelumnya yaitu kurikulum KTSP 2006. Dasar hukum dari pelaksanaan kurikulum 2013 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum 2013 dibuat melalui penyederhanaan dan dilaksanakan secara tematik-integratif, yakni menggabungkan beberapa mata pelajaran kedalam satu tema dengan tujuan mendorong dan menggali siswa untuk berani melakukan observasi, bertanya, menalar dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh dalam pembelajaran dengan harapan siswa memiliki kemampuan secara sikap, keterampilan dan pengetahuan yang jauh lebih baik.

Kurikulum 2013 berbeda dengan KTSP. Dalam KTSP tematik hanya diberikan pada siswa kelas I hingga kelas III sedangkan dalam Kurikulum 2013 dari kelas I hingga kelas VI. Dari aspek kelulusan, jika dalam KTSP hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja. Batas

ukuran kelulusan siswa kelas 6 dalam KTSP hanya dilihat dari nilai akhir siswa dalam Ujian Nasional, begitu pula dalam penentuan kriteria kenaikan kelas siswa hanya dilihat dari hasil rata-rata nilai siswa dalam aspek pengetahuan.

Penentuan kelulusan dan kriteria kenaikan kelas dalam Kurikulum 2013 bukan hanya dari segi pengetahuan tetapi juga melibatkan aspek sikap dan keterampilan. Penilaian siswa dalam pembelajaran sehari-hari bukan hanya pada aspek pengetahuan tetapi ada pula penilaian untuk sikap dan keterampilan siswa.

Untuk menuntut kemampuan guru harus memiliki ketrampilan dalam mempersiapkan peserta didik dalam melaksanakan Kurikulum 2013, selain dituntut memiliki keterampilan tersebut guru juga dituntut memiliki kemampuan untuk menyusun RPP. Berkaitan dengan itu peneliti mencoba menanyakan tentang kemampuan guru dalam mempersiapkan RPP tematik Kurikulum 2013, dari hasil wawancara dengan bapak Kepala Sekolah menjelaskan bahwa guru diberi pelatihan dalam pembuatan RPP Kurikulum 2013, berikut kutipan wawancaranya:

“Sebelum dijalkannya Kurikulum 2013 guru-guru diberikan sosialisasi berupa pelatihan tentang cara pembuatan RPP dan proses pembelajaran di kelas. Sosialisasi Guru kelas satu dilakukan di kota Blitar selama kurang lebih satu minggu, sedangkan untuk guru kelas empat diletakkan di kota Batu selama kurang lebih satu minggu pula. Sosialisasi ini dilakukan secara bertahap mas, ditahun ajaran 2013-2014 guru-guru yang diikutkan sosialisasi yaitu guru kelas satu berjumlah empat orang dan guru kelas empat berjumlah 5 orang. Sebelum memasuki tahun ajaran baru 2014-2015, guru-guru yang belum mengikuti sosialisasi pembuatan RPP dan proses pembelajaran di kelas diberi kesempatan untuk mengikuti sosialisasi tersebut.” (Sumber wawancara Bapak H. Abdul Barry, S.Pd)

Sosialisasi yang diberikan tidak hanya berasal dari Dinas Pendidikan Surabaya saja tetapi ada juga yang dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Terkadang informasi yang diberikan dari masing-masing narasumber memberikan pemahaman yang berbeda, pemahaman yang berbeda ini membuat guru-guru mengalami kesulitan dalam penyusunan RPP.

Kurikulum 2013 diharapkan bisa memberikan wadah bagi siswa untuk ikut terjun langsung dalam pembelajaran sehingga bisa mengembangkan siswa bukan hanya dari segi pengetahuan tetapi dari segi sikap dan keterampilan sehingga pembelajaran bisa menjadi pengalaman siswa agar lebih mudah diingat.

Kurikulum 2013 mulai dijalankan sejak bulan Juli 2013 di beberapa sekolah di kota besar. Salah satunya yaitu Kota Surabaya. Kurikulum

2013 diterapkan di beberapa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang ada di Surabaya. Ada 13 sekolah dasar yang ada di Surabaya yang dijadikan pemerintah sebagai sekolah sasaran. 11 diantaranya adalah SD Negeri dan 2 SD Swasta.

## **2. Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya**

SD Al-Islah merupakan salah satu SD yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan SD Al-Islah sudah memiliki akreditasi A, lokasi sekolah juga mudah dijangkau, untuk penerimaan buku dan guru-guru di SD Al-Islah dianggap sudah siap untuk menjalankan Kurikulum 2013.

SD Al-Islah sudah menjalankan Kurikulum 2013 selama tiga semester. Sejak Kurikulum 2013 dikeluarkan hingga saat ini ada empat jenjang kelas yang menjalankan Kurikulum 2013, kelas I dan II serta kelas IV dan V.

Penerapan Kurikulum 2013 di kelas I dan II berbeda dengan kelas IV dan V, bila dalam kelas IV dan V memuat mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, IPA, SBdP dan PJOK yang dilebur menjadi satu, sedangkan dalam kelas I dan II tanpa ada mata pelajaran IPA dan IPS. Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah sama saja dengan di sekolah lainnya tidak ada yang berbeda. Pembelajaran pada kelas I dan II lebih banyak mengajak siswa untuk belajar, bermain sambil bernyanyi serta memberikan contoh kongkrit dari setiap materi yang dipelajari. Beban pengetahuan yang dipelajari juga masih sederhana. Berbeda dengan pembelajaran di kelas IV dan V, karena siswa harus mulai belajar berfikir abstrak dan bisa menarik suatu kesimpulan serta mencari penyelesaian dari suatu masalah maka siswa diajak untuk melaksanakan praktikum-praktikum yang bersifat ilmiah. Beban pengetahuan yang dipelajari juga lebih kompleks, sedangkan dari aspek keterampilan di bidang kesenian dan olahraga tidak jauh berbeda antara kelas I dan II serta kelas IV dan V.

Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan, hanya saja masih ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Melihat secara nyata mengenai baik buruknya implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan akan bisa dilihat dari indikator yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat sesuai dengan yang diungkapkan oleh George Edward III yang meliputi empat indikator, yaitu Dipsosis, Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi.

Salah satu sekolah yang dianalisis dengan menggunakan teori yang diungkapkan oleh George Edward III adalah SD Al-Islah Surabaya yang menurut penuturan Bapak Barry selaku kepala sekolah SD Al-Islah Surabaya terdapat permasalahan mengenai Implementasi Kurikulum

2013 di SD Al-Islah Surabaya. Berikut hasil yang didapat dari masing-masing indikator:

**a. Disposisi**

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan aspek disposisi menjadi pengaruh terhadap para implementor Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya dalam implementasi kebijakan. Sejak diterapkannya Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya, guru-guru sebagai implementor menyambut dengan baik meskipun pada awalnya merasa kebingungan dalam menjalankan Kurikulum 2013. Kebingungan ini terjadi karena guru-guru tidak mempunyai pandangan sama sekali tentang Kurikulum 2013 apalagi untuk guru kelas IV hingga kelas VI namun setelah adanya pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga lainnya guru-guru menjadi paham dan melaksanakannya dengan baik.

Kurikulum 2013 juga memberikan dampak positif untuk guru karena guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan materi yang sedang disampaikan sehingga buku bukan lagi sumber belajar utama tetapi lingkungan sekitar siswa juga bisa memberikan pelajaran pada siswa sehingga lebih mudah untuk diingat.

Penerapan kurikulum 2013 terhadap proses belajar mengajar membutuhkan aktor pelaksana yang tidak bisa begitu saja melakukan pekerjaannya dalam memberikan pembelajaran terhadap siswa. Di butuhkan sikap, komitmen, dan kecakapan yang baik dan tidak tergantung pada standar pekerjaan.

Komitmen guru tidak terlepas dari mekanisme yang mempengaruhi baik buruknya Disposisi dari pelaksana, yaitu Insentif dan rekrutmen pelaksana. Berikut akan dijelaskan masing-masing sub indikator dari disposisi:

1. Insentif

Insentif merupakan hal penting yang mempengaruhi baik buruknya pelaksanaan suatu kebijakan, karena dengan insentif yang baik, maka pelaksanaan akan baik. Jika insentif kurang, maka akan mempengaruhi buruknya implementor dalam melaksanakan tugasnya.

Insentif dari program kurikulum 2013 yang diterima oleh Guru dan Kepala Sekolah sudah baik. Insentif yang diterima dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Pengangkatan Birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, dalam hal ini adalah pelaksanaan kurikulum 2013. Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan

haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Rekrutmen pegawai baru tidak dilakukan di SD Al-Islah Surabaya dalam pelaksanaan kurikulum 2013. SD Al-Islah Surabaya hanya mengoptimalkan pegawai yang ada, hal ini dikarenakan pegawai yang ada sudah dirasa mampu dalam aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan. Misalnya dalam aspek sikap yaitu dalam proses belajar guru harus mengerti bagaimana karakter siswa seperti tidak mudah marah kepada siswa dan memotivasi siswa agar rajin belajar, aspek keterampilan adalah guru harus bisa mengembangkan media pembelajaran seperti guru yang membuat permainan yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari, menambah gambar-gambar yang dibutuhkan siswa dan yang terakhir aspek pengetahuan yaitu guru harus memiliki wawasan yang luas karena siswa rasa ingin tahunya sangat tinggi. Hanya saja perlu beberapa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan performa pegawai yang ada.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa proses rekrutmen tidak dilaksanakan tetapi lebih mengoptimalkan kemampuan guru yang sudah ada. Ditambah dengan pengadaan sosialisasi dan penataran yang sudah dilakukan mengenai pelaksanaan kurikulum 2013, sehingga kemampuan guru lebih meningkat dan tidak perlu merekrut pegawai baru.

**a. Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi akan memberi kontribusi pada pelaksana mengenai pengetahuan tentang apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyampaian komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miss communication*), hal tersebut karena sebagian komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terbiaskan di tengah jalan. Dari Kementerian Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS) menurunkan kebijakan secara vertical hingga sampai kesekolah-sekolah. Secara teknis sering kali ada beberapa informasi kebijakan yang terbiaskan

sehingga menyebabkan ketidaksamaan pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013, tetapi tidak terlalu fatal hanya beberapa bagian kecil.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa penyampaian informasi mengalami sedikit kendala, namun sekolah dapat mengatasi masalah tersebut. Tidak hanya informasi yang diperoleh tetapi juga buku pedoman yang diperoleh oleh para guru untuk acuan pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya sudah berjalan sesuai dengan buku pedoman yang ada, dan sosialisasi dari wali kelas yang diberikan pada wali murid dapat di terima dengan baik. Hal tersebut menjadikan program ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### 2. Kejelasan

Komunikasi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Melihat dari responden yaitu beberapa siswa SD Al-Islah Surabaya yang berhasil diwawancarai sudah memberikan tanggapan yang positif mengenai kurikulum 2013.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan oleh Guru sudah dapat dimengerti dengan baik oleh para Siswa yang ada di SD Al-Islah Surabaya.

### 3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Dalam memberikan sosialisasi terhadap guru, staff dan siswa tidak pernah berubah. Jadi sosialisasi yang dilakukan sudah sangat maksimal. Dan untuk itu, hubungan komunikasi antar staff dan guru berjalan lancar dan mempengaruhi berjalannya kurikulum 2013 yang telah dilakukan.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa konsistensi informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah tetap konsisten dalam memberikan informasi dan sudah dapat dimengerti dengan baik oleh para staff dan guru di SD Al-Islah Surabaya.

## b. Sumber daya

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif

bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya, sumber daya terbagi menjadi beberapa sub indikator yang meliputi: Staf, yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, fasilitas, bisa berupa dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

Berikut akan dijelaskan masing-masing sub indikator pada indikator sumber daya yang mempengaruhi Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya.

### 1. Staff

Staff pelaksana kurikulum 2013 meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik yaitu guru-guru dan tenaga kependidikan seperti Tata Usaha, tenaga kebersihan dan petugas perpustakaan. Guru yang ada di SD Al-Islah Surabaya terdiri dari 29 orang, 21 diantaranya adalah guru kelas dan 8 orang lainnya adalah guru bidang studi. Tenaga kependidikan meliputi Tata Usaha yang terdiri dari 3 orang pegawai, tenaga kebersihan 3 orang pegawai dan petugas perpustakaan ada 2 orang pegawai serta murid yang ada di SD Al-Islah Surabaya terdiri dari 825 siswa.

Tabel 4.3  
Data Staff SD Al-Islah Tahun 2013-2014

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Sekolah	1 Orang
2.	Guru Kelas	21 Orang
3.	Guru Bidang Studi	8 Orang
4.	Staff TU	3 Orang
5.	Petugas Kebersihan	3 Orang
6.	Jumlah Siswa	825 Orang

(Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Novita Nurma S.W, S.Pd)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah guru kelas 21 orang sedangkan jumlah seluruh siswa 825 orang. 825 siswa tersebut terbagi menjadi 21 rombongan belajar diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Jumlah Rombongan Belajar SD Al-Islah tahun 2014-2015

NO	KELAS	JUMLAH ROMBEL
1.	I	4
2.	II	4
3.	III	4
4.	IV	3
5.	V	3

6.	VI	3
JUMLAH		21

(Sumber: Data SD Al-Islah tahun 2014)  
 oleh karena itu dengan jumlah guru dan siswa yang ada di SD Al-Islah Surabaya terdapat kesenjangan. Idealnya satu guru bisa mengajar 32 siswa dalam satu kelas, tetapi di SD Al-Islah belum dapat dikatakan ideal karena jumlah guru yang ada masih kurang dibandingkan dengan banyaknya jumlah siswa.

Banyaknya jumlah siswa yang ada membuat guru-guru di SD Al-Islah Surabaya mengalami kendala dalam melakukan penilaian.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 masih ada kendala dalam melakukan penilaian dan masih belum berjalan dengan baik

## 2. Fasilitas

Fasilitas adalah bagian penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dikarenakan berbagai macam hal akan membutuhkan peralatan untuk membantu dalam melaksanakan tugas. Fasilitas yang ada di SD Al-Islah Surabaya seperti ruang teori 20 unit, kamar mandi 15 unit, aula 1 unit, parkir 1 unit, gudang 1 unit, lapangan 1 unit, LCD perpustakaan 1 unit, proyektor 1 unit, ruang UKS 1 unit, Lab. Komputer 1 unit, musholah 1 unit, ruang TU 1 unit, ruang Kepala Sekolah 1 unit, buku perpustakaan yang berjumlah 2000 unit buku, kursi siswa berjumlah 673 unit kursi, bangku siswa berjumlah 561 unit bangku, komputer berjumlah 40 unit, dan beberapa media pendidikan yang diperlukan untuk proses pembelajaran. Semua fasilitas yang ada di SD Al-Islah Surabaya sudah sangat baik dan memadai serta bisa membantu dalam proses pembelajaran.

Kurikulum 2013 sudah berjalan lancar. Hanya saja masih ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Diantaranya proses penilaian yang terlalu banyak maka membutuhkan waktu yang cukup banyak pula untuk menyelesaikannya dan juga penerimaan buku Kurikulum 2013 yang kadang terlambat dari yang sudah dijadwalkan. Sehingga proses pembelajaran di kelas juga terhambat, dalam proses penilaian adalah salah satu masalah yang ada dalam melaksanakan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya.

### c. Struktur birokrasi

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan *Standart Operating*

*Prosedur* (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum dalam pedoman dan aturan pelaksanaan kurikulum 2013). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Melihat dari sudut pandang SOP para Kepala Sekolah, Guru dan Staff di SD Al-Islah Surabaya telah mendapatkan buku pedoman Implementasi Kurikulum 2013 dimana didalamnya terdapat dasar acuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mereka dapat melihat dan membaca kapan saja saat mereka membutuhkan pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dengan begitu tindakan mereka akan sesuai dengan pedoman SOP yang ada.

Pada penjabaran tugas dan fungsi dalam bentuk struktur organisasi, pelaksanaan Kurikulum 2013 terbagi menjadi beberapa struktur mulai dari Kementerian Pendidikan hingga pada ujung tombak pelaksana Kurikulum 2013, yaitu Sekolah. Pernyataan di atas membuktikan bahwa penjabaran dan fungsi pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan pedoman atau SOP yang ada.

Fragmantasi adalah salah satu karakteristik yang dapat mendongkrak struktur birokrasi atau organisasi tentang pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013.

SD Al-Islah Surabaya sudah melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan tanggung jawab seperti dalam hal penilaian sehingga Kurikulum 2013 sudah berjalan dengan lancar dan baik.

## B. Pembahasan

Kebijakan publik didefinisikan oleh Edward dan Sharkansky dalam Islamy, (2002:19) "*What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs.*" yang dapat diartikan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan- tindakan yang dilakukan pemerintah.

Sosialisasi dalam penerapan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya masih belum berjalan

dengan baik karena masih terdapat kendala dalam penyusunan RPP sehingga perlu diadakan pelatihan seperti yang ada di Batu dan Blitar.

Variabel-variabel yang terlibat pada Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya, maka dapat dilakukan analisis Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya sesuai dengan teori yang dijadikan dasar untuk menilai baik tidaknya suatu kebijakan, dan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya mempunyai unsur-unsur implementasi seperti yang dijelaskan oleh Tachjan (2006:26) yaitu (a) unsur pelaksana dimana pada pelaksanaan Kurikulum 2013 harus ada pelaksana, pelaksana tersebut adalah Kepala Sekolah, Guru dan Staf yang melaksanakan Kurikulum 2013. Masing-masing pelaksana memiliki tugas dan fungsi yang berbeda akan tetapi dalam hal ini masing-masing memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan dan mewujudkan tujuan dari pada Kurikulum 2013, (b) adanya program yang dilaksanakan, Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya sudah berjalan atau dilaksanakan dengan baik, karena Kurikulum 2013 sudah dijalankan dengan mengacu pedoman aturan SOP yang ada, (c) *Target group* atau kelompok sasaran, kelompok sasaran dari Kurikulum 2013 adalah para siswa agar para siswa menjadi peserta didik yang aktif, kritis dan menyenangkan. Dari tiga unsur ini akan dapat memberikan hasil yang baik dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya atau sesuai tujuan yang telah ditentukan, dan ada empat indikator yang disebutkan oleh George Edward III. Indikator yang disebutkan oleh Edward meliputi Disposisi, Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Organisasi.

Untuk memperoleh penjelasan baik atau buruknya Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya, maka setiap indikator yang telah disebutkan, dilihat dalam bentuk nyata dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam keseharian para pelaksana. Berikut analisis pada masing-masing indikator:

### 1. Disposisi

Apabila pelaksanaan suatu kebijakan ingin berjalan secara efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2008 : 152), adalah Pengangkatan birokrat dan Insentif.

#### a. Insentif

Salah satu cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi/kepentingan

sendiri atau organisasi. Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

Insentif dirasakan cukup bagi Kepala Sekolah, Guru dan Staff meskipun pada saat dilaksanakan wawancara oleh penulis para Guru dan Kepala Sekolah tidak bisa memberitahukan berapa besar gaji yang diterima oleh mereka, namun Guru dan Kepala Sekolah mengatakan jika gaji yang diterima mereka tiap bulan sudah dirasakan cukup memenuhi kebutuhan hidup.

Pengaruh insentif dapat dibuktikan pada Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya. Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya dapat dinilai baik karena tidak ditemukan banyak kendala yang berhubungan dengan komitmen para pelaksana.

#### b. Pengangkatan Birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

## 2. Komunikasi

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada setiap bagian agar para implementor konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya pada indikator transmisi sendiri, komunikasi yang ada antar KEMENDIKNAS dan Sekolah secara teknis sering kali ada beberapa informasi kebijakan yang terbiaskan sehingga menyebabkan ketidak samaan pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013, tetapi tidak terlalu fatal hanya beberapa bagian kecil, namun sekolah sendiri dapat menyelesaikannya.

Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya pada indikator kejelasan sudah baik. Bahwa kejelasan informasi yang disampaikan oleh Guru sudah dapat dimengerti dengan baik oleh para Siswa yang ada di SD Al-Islah Surabaya.

Pada indikator konsistensi, Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya sudah baik. Bahwa konsistensi informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah tetap konsisten dalam memberikan informasi dan sudah dapat dimengerti dengan baik oleh para staff dan guru di SD Al-Islah Surabaya. Jadi, sosialisasi yang dilakukan sudah sangat maksimal.

### 3. Sumber Daya

Variabel atau faktor selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2008 : 151). Indikator sumber daya meliputi Staf dan Fasilitas.

Pada indikator staf dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya masih belum berjalan dengan baik, Staff pelaksana kurikulum 2013 meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik yaitu guru guru dan tenaga kependidikan seperti Tata Usaha, tenaga kebersihan, koperasi dan petugas perpustakaan. Guru yang ada di SD Al-Islah Surabaya terdiri dari 29 orang dan tenaga kependidikan meliputi Tata Usaha yang terdiri dari 3 orang pegawai, tenaga kebersihan 3 orang pegawai dan petugas perpustakaan ada 2 orang pegawai dan murid yang ada di SD Al-Islah Surabaya terdiri dari 825 siswa. Dengan jumlah siswa yang begitu banyak guru di SD Al-Islah Surabaya mendapatkan kendala dalam melakukan penilaian.

Pada indikator fasilitas dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya sudah baik. Fasilitas yang ada di SD Al-Islah Surabaya seperti ruang teori 20 unit, kamar mandi 15 unit, aula 1 unit, parkir 1 unit, gudang 1 unit, lapangan 1 unit, LCD perpustakaan 1 unit, proyektor 1 unit, ruang UKS 1 unit, Lab. Computer 1 unit, musholah 1 unit, ruang TU 1 unit, ruang Kepala Sekolah 1 unit, buku perpustakaan yang berjumlah 2000 unit buku, kursi siswa berjumlah 673 unit kursi, bangku siswa berjumlah 561 unit bangku, computer berjumlah 40 unit, dan media pendidikan, semua fasilitas yang ada di SD Al-Islah Surabaya sudah sangat baik dan memadai. Fasilitas-fasilitas tersebut sudah cukup membantu mereka dalam melaksanakan tugas keseharian mereka. Fasilitas yang diterima oleh para guru, staff dan murid sudah dapat mendukung dalam melaksanakan program kurikulum 2013.

### 4. Struktur birokrasi

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan *Standart Operating Prosedur* (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu

kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum dalam pedoman dan aturan pelaksanaan kurikulum 2013). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Melihat dari sudut pandang SOP para Kepala Sekolah, Guru dan Staff di SD Al-Islah Surabaya telah mendapatkan pedoman Implementasi Kurikulum 2013 dimana didalamnya terdapat dasar acuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga mereka dapat melihat dan membaca kapan saja saat mereka membutuhkan pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dengan begitu tindakan mereka akan sesuai dengan pedoman SOP yang ada.

Pada penjabaran tugas dan fungsi dalam bentuk struktur organisasi, pelaksanaan Kurikulum 2013 terbagi menjadi beberapa struktur mulai dari Kementerian Pendidikan hingga pada ujung tombak pelaksana Kurikulum 2013, yaitu Sekolah. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa penjabaran dan fungsi pelaksana dalam struktur organisasi sudah baik, begitu pula pada fragmentasi yang dilakukan di SD Al-Islah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya telah tergambarkan dalam empat variabel yang telah dikemukakan George Edward III, dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah Kepala Sekolah, Guru dan Staf. *Target group* atau kelompok sasaran, kelompok sasaran dari Kurikulum 2013 adalah para siswa agar para siswa menjadi peserta didik yang aktif, kritis dan menyenangkan. Mengenai empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menyimpulkan bahwa Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya sudah berjalan, namun masih perlu adanya perbaikan pelaksana Kurikulum 2013 misalnya Guru (tenaga pendidik).

Berdasarkan variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan analisis implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya dilihat dari indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan, tetapi perlu ada peningkatan pada indikator transmisi, seperti informasi antara KEMENDIKNAS ke sekolah, karena masih terjadi informasi yang tidak tersampaikan dengan baik

atau tidak tepat. Komunikasi yang dilakukan didalam Kurikulum 2013, Kementrian Pendidikan melakukan sosialisasi di Diknas Surabaya, para guru diberikan penataran atau pelatihan di kota Batu dan Blitar selama satu minggu.

#### 2. Sumber Daya

Dari sudut pandang sumber daya, implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya masih kurang karena jika dilihat dari banyaknya jumlah siswa 825 siswa. Jumlah guru hanya berjumlah 29 orang dari berbagai latar belakang pendidikan, dirasa jumlah tenaga pendidik masih kurang. Dari jumlah data statistik sekolah SD Al-Islah Surabaya guru berjumlah 29 orang dan murid berjumlah 825 siswa, hal ini mengakibatkan kesenjangan antara jumlah guru dengan murid, ada juga kendala dalam pengiriman buku materi belajar Kurikulum 2013 yang terlambat datang. Fasilitas yang ada di SD Al-Islah Surabaya sudah menunjang pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kegiatan belajar mengajar, seperti fasilitas globe, alat peraga, computer dan beberapa fasilitas yang ada sudah memadai.

#### 3. Disposisi

Pada variabel disposisi sikap staf guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013 sudah baik serta memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik, selain itu insentif yang diberikan yayasan kepada guru tetap ataupun belum tetap sudah memenuhi kebutuhan hidup guru itu sendiri.

#### 4. Struktur Birokrasi

Implementasi Kurikulum 2013 di SD Al-Islah Surabaya para pelaksana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan buku pedoman atau SOP dari Kurikulum 2013, pelaksana Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan secara berurutan atau terstruktur yang pertama melalui Kepala Sekolah turun ke guru atau staf turun lagi ke siswa dan yang terakhir turun ke wali murid, selain itu pelaksana juga sudah memberikan tanggung jawabnya berupa penilaian.

menambahkan jumlah guru diharapkan proses penilaian lebih cepat selesai.

### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, J. Lexi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya.

Miles B Matthew & Huberman, A Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, diterjemahkan oleh tjetjep Rohand Rohidi*. Universitas Indonesia (UI Perss) : Jakarta.

Subarsono AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Soedjatmoko. 1983. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono . 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Winarmo, Budi. 2002. *Teori dan proses kebijakan publik*. Media presindo: Yogyakarta.

Wahab Abdul Solichin. 2006. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis kebijakan public (konsep dan aplikasi proses kebijakan publik)*. Malang: Bayumedia.

[www.ejurnal.unri.ac.id,2014](http://www.ejurnal.unri.ac.id,2014)

[www.pengertianahli.com, 2014](http://www.pengertianahli.com, 2014)

[www.pendidikan-diy.go.id, 2014](http://www.pendidikan-diy.go.id, 2014)

Sumber: Buku Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2014

Sumber: <http://en.hukumonline.com, 2014>

[www.republika.co.id, 2014](http://www.republika.co.id, 2014)

Sumber: [kurikulum.kemendikbud.go.id, 2014](http://kurikulum.kemendikbud.go.id, 2014)

### B. Saran

1. Komunikasi antara KEMENDIKNAS yang terkait dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 diharapkan ada pertemuan rutin untuk membahas Kurikulum 2013 itu sendiri antara pihak Diknas dan pihak sekolah-sekolah agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Pelatihan guru yang dilaksanakan oleh semua guru untuk menambah pengetahuan guru serta meningkatkan performa guru.
3. Untuk pengiriman buku seperti buku materi belajar Kurikulum 2013 bisa lebih cepat dari waktu yang seharusnya agar tidak ada keterlambatan dalam proses pembelajaran.
4. SD Al-Islah Surabaya diharapkan bisa menambahkan jumlah guru agar tidak terjadi kesenjangan antara guru dan siswa, dengan